

PELATIHAN PEMANFAATAN WEB GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN BERBASISI SMART VILLAGE DI DESA

Sudewi¹, Sri Ipnuwati², Joni³, Widiyanto⁴, Ongki Kristian⁵, Ika Rahmawati⁶

^{1,2}Prodi Sistem Informasi, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

^{3,4,5,6}Prodi Manajemen Informatika, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

^{1,2,3,4,5}Jl. Wisma Rini, No.09 Pringsewu, Lampung, Indonesia

E-mail: sudewistmik@gmail.com¹, nengachie@gmail.com², jonimti@gmail.com³,
widiyanto@ibnus.ac.id⁴, ongkikristiana@gmail.com⁵, ikarahmawati@gmail.com⁶

Abstrak

Teknologi internet yang kini sudah mendarahdaging harus dimanfaatkan secara optimal. Sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Pelayanan Negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau koporasi untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dengan memanfaatkan sosialisasi dan pelatihan internet, aparatur desa dapat mengoptimalkan peran mereka dalam memajukan desa secara keseluruhan dan memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini

Kata Kunci: Layanan Publik, *Smart Village*, Desa Panutan, Perangkat Desa

Abstract

Internet technology, which is now ingrained, must be utilized optimally. It would be progress if the government began to adopt this technology as the main infrastructure for public services. State service to its citizens is a mandate stated in the 1945 Constitution and clarified again in Law no. 25 of 2009 concerning Public Services. The Public Service Law regulates the principles of good governance so that government functions run effectively. Public services are carried out by government agencies or corporations to strengthen democracy and human rights, promote economic prosperity, social cohesion, reduce poverty, increase environmental protection, be wise in the use of natural resources, deepen trust in government and public administration. By utilizing internet outreach and training, village officials can optimize their role in advancing the village as a whole and ensure that they can face the challenges and opportunities in this digital era

Keywords: *Public Services, Smart Village, Role Model Village, Village Apparatus*

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan bentuk perkembangan jaman. Seluruh manusia di muka bumi dipaksa untuk membuka mata pada perubahan teknologi yang sedemikian cepat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Tak dipungkiri, kemajuan

teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik. Sudah bukan rahasia umum jika pelayanan publik di negeri ini dapat dikatakan jauh panggang dari api. Cepat hanya untuk pihak-pihak tertentu. Keberadaan teknologi diharapkan menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan.

(Indrajit, 2005) Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Akibat menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintahan desa. Namun di balik keterbatasan tersebut, muncul desa-desa yang mampu menggunakan dan memanfaatkan TIK guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, sehingga mampu meningkatkan pembangunan desa tersebut. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa.

(RI, 2008) Kebijakan dan program-program pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek bukan sebagai subjek, program-program pemanfaatan TIK hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Oleh karena itu, dengan munculnya gerakan dari desa yang dapat menyelenggarakan pemeritahan secara baik dan mandiri, yang didukung dengan pemanfaatan TIK, menjadi pelajaran bahwa inisiatif tersebut dapat dilakukan dari bawah. Dengan demikian desa tersebut mampu melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan desa itu sendiri. (Fatmawati, Irviani, Rachman, Putu, Anggie, & Kristina, 2016) Di antara pemanfaatan TIK oleh desa misalnya: (1) Penggunaan piranti lunak sumber terbuka dalam kegiatan operasional; (2) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan membangun jejaring antar desa; (3) Pembuatan website/blog guna keperluan diseminasi informasi kegiatan yang dilakukan oleh warga maupun aparat desa, meningkatkan penyebaran informasi sampai melewati batas wilayah; (4) Penggunaan sistem informasi untuk melaksanakan pelayanan publik, memperkenalkan potensi desa maupun menyosialisasikan pembangunan desa. (Purnamasari, 2017) Hal-hal tersebut dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kemandirian di tingkat desa.

Kegiatan ini dilakukan di Desa Panutan, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Lampung, dengan memanfaatkan TIK untuk mendukung pembangunan dan kemandirian desa tersebut. Hasil kegiatan ini diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak di antaranya, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI Khususnya Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa, desa-desa lain yang ingin menggunakan maupun memanfaatkan TIK sesuai dengan kebutuhan desa dalam kerangka pembangunan dan mendukung kemandirian desa, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian berfokus pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Penggunaan atau pemanfaatan TIK dalam penelitian ini diartikan sebagai

pemanfaatan TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat. Sangat penting untuk mengetahui pemanfaatan TIK di tingkat pemerintahan desa, karena desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang biasanya tertinggal dalam hal pemanfaatan TIK, dengan adanya inisiatif dari desa, studi mengenai pemanfaatan TIK di tingkat desa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Government Bagi Aparatur Desa Kerjasama Institut Bakti Nusantara dan Desa Panutan, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Manfaat yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat adalah menambah pengetahuan dan kemampuan aparatur Desa Panutan dalam memberikan layanan yang prima cepat, tepat dengan memanfaatkan media internet dan web government sebagai platform layanan serta informasi publik yang terbuka dan transparan.

METODE KEGIATAN

2.1. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan materi berupa pengetahuan tentang perkembangan internet dan peluang yang ada akibat kemajuan internet yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem pemerintah. Memaparkan contoh-contoh penerapan teknologi informasi yang sukses dengan memanfaatkan teknologi khususnya *e-government* sehingga hal ini dapat menjadi contoh pengembangan dan dapat menjadi perangsang untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan.



Gambar 1. Perangkat Desa Panutan Praktek Menggunakan Aplikasi Dasar Office

2. Memberikan panduan teknik/cara memanfaatkan teknologi melalui internet khususnya *e-government* sebagai sarana sistem pengembangan sistem pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mengaplikasikan dan bertanya

mengenai hal-hal yang belum jelas selama pemaparan materi sehingga peserta semakin mengerti tentang materi yang telah disampaikan (Anggraeni & Muslihudin, 2020).



Gambar 2. Praktek Pembuatan Laporan Pembukuan Desa

2.2. Waktu Dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Pemanfaatan Web Government Sebagai Upaya Meningkatkan Layanan Berbasisi *Smart Village Di Desa*” dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 di Balai Desa Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Peserta terdiri dari para aparatur Desa/Pekon. Berikut ini jadwal kegiatan yang dilakukan oleh Tim Narasumber :

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

| Waktu Kegiatan | Uraiaan Kegiatan | Keterangan |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| 08.00 - 09.00 WIB | Pembukaan -MC -Lagu Indonesia Raya -Sambutan Kepada Desa -Sambutan Tim IBN -Doa | Panitia |
| 09.00 - 09.15 WIB | Coffee Break | Panitia |
| 09.15 - 10.30 WIB | Materi MS. Office | Sri Ipnuwati, M.Kom & Sudewi, MM |
| 10.30 - 12.00 WIB | Materi Internet Sebagai Media Percepatan Layanan | M. Muslihudin, MTI & Sutejo, MTI |
| 12.00 - 13.00 WIB | ISHOMA | Panitia |
| 13.00 - 15.00 WIB | Praktek Input Berita Pada Web Desa | Widiyanto, MTI, Joni, MTI dan Tim |
| 15.00 - 15.30 WIB | Penutupan | Panitia |

2.3. Peserta Kegiatan

Penyampaian materi pertama dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat dengan topik pengembangan Teknologi *E-Goverment* Sebagai Trasformasi Layanan Publik. Di ikuti oleh Seluruh Jajaran Perangkat Desa Panutan, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu bekerjasama dengan Institut Bakti Nusantara.



Gambar 3. Penyerahan Berita Acara dan Kontrak Pendampingan serta pengembangan Sistem Informasi Desa

HASIL KEGIATAN

3.1. Tahapan Kegiatan PkM

Untuk menguraikan alur Proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pendampingan pemanfaatan Web Desa maka akan dibagi kedalam empat tahapan sebagaimana berikut ini:



Gambar 4. Tahapan dan Proses PkM

3.2. Proses PkM

1. Persiapan & Analisa Kebutuhan

Pengembangan web desa melibatkan serangkaian proses analisis untuk memahami kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa proses analisis yang umumnya dilakukan dalam pengembangan web desa (Haris, Kusuma, & Anshori, 2022):

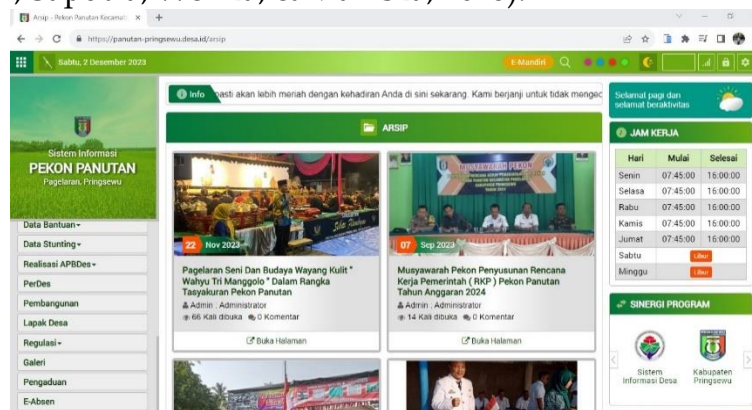
- Analisis Kebutuhan Pengguna ialah Identifikasi stakeholder dan pengguna potensial web desa. Tim PkM Lakukan wawancara, survei, atau diskusi untuk memahami kebutuhan, harapan, dan tantangan

yang dihadapi oleh masyarakat desa. Tinjau data demografis dan sosioekonomi untuk memahami karakteristik pengguna.

- Analisis Tujuan dan Konten Interface akan menentukan tujuan utama dari pengembangan web desa. Apakah itu untuk memberikan akses informasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, atau mendukung pengembangan ekonomi lokal. Identifikasi indikator kinerja atau metrik untuk mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Identifikasi jenis informasi yang harus disertakan dalam web desa, seperti informasi pemerintah, berita lokal, kalender acara, fasilitas umum, dll. Pertimbangkan bagaimana informasi tersebut akan diorganisir dan disajikan kepada pengguna. Tinjau infrastruktur dan interface teknologi yang sudah ada di desa, seperti akses internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang mungkin sudah digunakan. Pilih teknologi yang sesuai untuk pengembangan web desa, termasuk keamanan dan ketersediaan.
- Analisis Keamanan (*Security Analysis*) Pertimbangkan kebutuhan keamanan data, terutama jika web desa akan mengandung informasi sensitif. Pastikan bahwa pengaturan keamanan dan privasi memadai untuk melindungi data pengguna dan informasi desa.

2. Pengembangan Website dan Uji Lab

Analisis Desain Tentukan antarmuka pengguna yang sesuai dan ramah pengguna. Pastikan desain web desa memperhatikan keberagaman pengguna dan ketersediaan aksesibilitas. Proses analisis ini membantu tim pengembangan web desa untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat desa yang bersangkutan (Hamzah Alfariz, 2017; Saputra, Weriza, & Mallisza, 2018).



Gambar 5. Hasil Tampilan Web Pekon/Desa Panutan

3. Sosialisasi

Sosialisasi dan pelatihan internet bagi aparatur desa memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, terutama mengingat peran teknologi informasi dan internet dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi desa. Aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi dan internet, termasuk keterampilan dasar seperti browsing, penggunaan email, dan pengelolaan informasi digital. Ini penting untuk menghadapi tuntutan administrasi modern (Widianto, 2014)(Paryanta, Sutariyani, & Susilowati, 2017).



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi Pada Aparat Pekon Penutan

Pemahaman yang lebih baik tentang teknologi dapat membantu aparatur desa dalam mengotomatisasi tugas administratif, seperti pengelolaan data penduduk, pembuatan laporan, dan pemantauan kegiatan desa. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan. Dengan keterampilan internet, aparatur desa dapat dengan mudah mengakses informasi terkini dan sumber daya yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini termasuk peraturan pemerintah, panduan, dan data penting lainnya.



Gambar 7. Grafik Hasil Pemahaman Implementasi Web Desa

Aparatur desa yang terampil dalam menggunakan internet dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. Mereka dapat mempublikasikan informasi desa, menjawab pertanyaan masyarakat, dan menerima masukan lebih efektif melalui platform online. Dengan memiliki aparatur desa yang terampil dalam teknologi, masyarakat desa juga dapat diberdayakan untuk mengakses

informasi, pelatihan, dan layanan online. Hal ini mendukung inklusi digital dan pemberdayaan masyarakat.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan (*Sustainability Analysis*) dalam web Desa Panutan dapat di Pertimbangkan bagaimana web desa akan dipelihara dan dikelola setelah peluncuran awal. Identifikasi model keuangan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional. Analisis Aksesibilitas (*Accessibility Analysis*) Pastikan bahwa web desa dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kelompok, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau aksesibilitas internet yang terbatas.

KESIMPULAN

Dengan pelatihan internet, aparatur desa dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini mencakup pemasaran produk lokal secara online, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke sumber daya ekonomi digital. Pelatihan internet juga melibatkan pemahaman tentang keamanan online dan perlindungan data. Aparatur desa yang teredukasi dapat membantu melindungi informasi sensitif dan mencegah risiko keamanan yang mungkin terjadi. Dengan memanfaatkan sosialisasi dan pelatihan internet, aparatur desa dapat mengoptimalkan peran mereka dalam memajukan desa secara keseluruhan dan memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Kegiatan berjalan dengan baik diikuti oleh antusiasme peserta yang hadir selama kegiatan berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan peran peserta dalam mencoba dan memberikan pertanyaan kepada Tim pengabdian hingga akhir kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti ini dapat dilaksanakan secara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., & Muslihudin, M. (2020). Sosialisai Dan Pendampingan Pengelolaan Website Desa Kepada Aparatur Desa. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 41-50.
- Fatmawati, Irviani, R., Rachman, E. S., Putu, I., Anggie, A., & Kristina, M. (2016). Tata Kelola Teknologi Informasi Sebagai Implementasi E-Government Pada Kabupaten Pemekaran Untuk Meningkatkan Potensi Daerah (Studi : Kabupaten Pringsewu Lampung). *Proseding Senapati*, 1(1).
- Hamzah Alfariz, S. (2017). E-Government Pemberdayaan Desa Sukoharjo 1 Dan Potensi Desa Berbasis Web. In *KMSI* (pp. 254-258).
- Haris, M. S., Kusuma, W. T., & Anshori, M. (2022). Peningkatan Literasi Teknologi Pemasaran Digital Petani Kopi Gapoktan Mekar Tani Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB)*, 1(2), 147-155.
- Indrajit, R. E. (2005). *E Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Paryanta, Sutariyani, & Susilowati, D. (2017). Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web desa Sawahan. *IJSE - Indonesian Journal on Software Engineering Sistem*, 3(2), 77-81.
- Purnamasari, D. (2017). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*

- Tentang Desa. Undang-Undang Desa. Sinar Grafika.*
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- RI, U. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008 § (2008).
- Saputra, A., Weriza, J., & Mallisza, D. (2018). E-Administration of Population in West Bungus Village. *Unes Journal of Information System*, 3(1), 036. <https://doi.org/10.31933/ujis.3.1.036-047.2018>
- Widianto. (2014). Sistem Informasi Potensi Desa (Study Kasus Desa Wayngison - Pagelaran). *Proseding KMSI*, 2(1), 36-43.